



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARNI MUNASIH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 742223

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m²/270 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 415 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 2100 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.500.000

1. MOTOR, HONDA NF125 TD MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE 1.2L GLX (4X2) MT Tahun 2013, LAINNYA Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA F1CO2N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.480.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.639.830**F. HARTA LAINNYA** Rp. 11.250.000

Sub Total Rp. 561.869.830

III. HUTANG Rp. 216.623.270**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 345.246.560

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.